Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan *Public Accountability of School Operational Assistance at State Elementary School No. 060958 Belawan*

Syerly^{*1)}, R. Hamdani Harahap²⁾ & E. Harso Kardhinata²⁾

¹⁾ Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: syerlymapuma@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk menaikkan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan meringankan beban siswa di masa depan, guna memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dalam pelaksanaan berbagai hambatan baik dari segi kelembagaan maupun teknis. aspek operasi. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS di SD Negeri. 060958 Belawan dilihat dari aspek proses pengambilan keputusan yang dibuat secara tertulis, adanya Akurasi dan kelengkapan informasi terkait pengelolaan dana BOS, adanya Kejelasan sasaran kebijakan, dan Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan di umum telah berjalan dengan baik. Aspek Akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di Sekolah Dasar Negeri. 060958 Belawan belum efektif dalam pelaksanaannya adalah penyebarluasan informasi tentang pengelolaan dana BOS, akses publik ke informasi tentang kegiatan pengelolaan dana BOS, sistem informasi manajemen dan pemantauan hasil dan laporan tahunan.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik, Bantuan Operasional Sekolah

Abstract

Implementation of School Operational Assistance Program (BOS) aims to raise the cost of education for underprivileged students and lighten up for the students in the future, in order to obtain quality basic education services in the implementation of various obstacles both in terms of institutional and technical aspects of operations. One of the schools that received attention and School Operational Assistance (BOS) was the State Elementary School No. 060958 Belawan. Based on the results of the study can be concluded that the Implementation of Accountability in the Management of BOS funds in SD Negeri. 060958 Belawan seen from the aspect of the decision making process made in writing, the existence of Accuracy and completeness of information related to the management of BOS funds, the existence of Clarity of policy goals, and The existence of feasibility and consistency in financial reporting in general has been running well. Aspect of Accountability in Management of BOS in State Elementary School. 060958 Belawan not yet effective in pelaksanaannya is disseminating information about the management of BOS funds, public access to information on BOS fund management activities, management information system and monitoring of results and annual report.

Key words: Public Accountability, School Operational Assistance (BOS)

How to Cite: Syerly, Harahap, R.H. & Kardhinata, E.H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik*. 8 (1): 85-107.

PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2010-2015 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2008, APK tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2010 telah mencapai 88,68%. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK

minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target AKP, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tempat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Sejalan dengan visi Kota Medan 2011-2015, yaitu *Bersama Kita Membangun Rakyat Medan Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Beradab*, dan kemudian visi tersebut dijabarkan dalam

Misi yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat ; Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara merata, bermutu dan demokratis bagi masyarakat serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Medan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi pengangguran serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM, maka salah satu program Pemerintah di bidang pendidikan adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membesarkan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang laun, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan baik menyangkut aspek kelembagaan maupun

teknis operasional. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SD Negeri No. 060958 Belawan. Pada tahun 2010 SD Negeri No. 060958 Belawan mendapat bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 128.800.000,- yang telah digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri No. 060958 Belawan Tahun 2010.

Menurut BPK (2009), Akuntabilitas anggaran publik setidaknya ditandai oleh dua hal yaitu bebas pemborosan dan bebas korupsi. Pemborosan anggaran publik selama ini sering muncul dalam berbagai bentuk antara lain: (i) pengeluaran-pengeluaran negara yang berada pada tingkat yang tidak wajar; (ii) kegiatan-kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya; dan (iii) duplikasi kegiatan baik yang bersifat lintas program maupun lintas instansi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam pengelolaan keuangan negara. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan keuangan negara yang berasal dari APBN sehingga dalam pengelolaannya diperlukan adanya

akuntabilitas publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di SD Negeri No. 060958 Belawan Kota Medan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan (Maret-April 2017) dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan pengamatan tentang analisis Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri No. 060958 Belawan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan BOS pada masing-masing desa di SD Negeri No. 060958 Belawan. Para Stakeholders tersebut terdiri Kepala Sekolah, Guru-guru, Komite Sekolah dan Aparat Pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Medan). Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan informan yang dipandang mengerti dan memahami dalam pelaksanaan dan pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan Kota Medan.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan

tertentu, yaitu mereka yang terlibat dalam pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan Kota Medan. Adapun sampel penelitian adalah berjumlah 42 orang.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Kuesioner*, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. Dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan.
- b. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti, yaitu Kepala Sekolah.
- c. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk

menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accoutability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana

realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mahmudi, 2013: 9). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk bertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan

dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan.

Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Hopwood dan Tomkins (1942) dan Edwood (1993), dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik (Mahmudi, 2013: 10) adalah :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and legality*)
- b. Akuntabilitas manajerial (*Manajerial accountability*)
- c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
- e. Akuntabilitas finansial (*financia accountability*)

Pengertian Akuntabilitas sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiarjo (2008)

merupakan “Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Sedangkan oleh Guy Peters (2000:19) akuntabilitas publik didefinisikan sebagai “Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku atau pelaksana kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan”.

Lebih lanjut oleh Krina (2003) dijelaskan bahwa: ...secara garis besar akuntabilitas disimpulkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Senada dengan pendapat di atas, dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2012) disebutkan bahwa: Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Impelementasi Akuntabilitas di Indonesia

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 2008. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab

lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good governance.

UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good governance. Beberapa negara maju di Eropa seperti Jerman dan Inggris telah menerapkan konsep akuntabilitas hampir di setiap aspek pemerintahan sejak tahun 1970-an. Inggris di era John Major dan Toni Blair memasyarakatkan akuntabilitas dengan menyusun Output and Performance Analysis (OPA Guidance) atau pedoman tresuri kepada departemen/badan di lingkungan pemerintahan dan Guidance on Annual Report yang berisikan petunjuk

dalam menyusun laporan tahunan suatu badan kepada menteri, parlemen, dan masyarakat umum. Disamping itu pemerintah Inggris menetapkan gagasan tentang Public Services for The Future: Modernisation, Reform, Accountability yang intinya adalah setiap keputusan hendaknya jangan hanya berorientasi pada berapa banyak pengeluaran dan atau penyerapan dana untuk tiap area, tetapi juga mengenai peningkatan jasa yang diberikan dan perbaikan-perbaikan.

Berbeda dengan Inggris, Jerman sebagai negara yang berbentuk federasi, menetapkan bahwa keterlibatan pusat (central involvement) dalam kegiatan setiap menteri dibatasi pada masalah kepegawaian, teknologi informasi dan hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini, maka pemerintah sesuai dengan tingkatannya secara formal mempunyai akuntabilitas (public accountability) kepada parlemen di tiap tingkatan pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal). Demikian pula dengan menikmati tingkat independen operasional yang tinggi, maka seorang menteri dapat secara leluasa melakukan kegiatannya, dan dengan demikian konsep dan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan secara komprehensif.

Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam bentuk Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat unit kerja Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh karenanya capaian dan cakupannya masih tergolong rendah. Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Negara, dan BPKP, maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan

negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan sufficient condition atau kondisi yang harus ada.

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan strategik tersebut.

Namun demikian, implemementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat,

dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi.

Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral hazard individu pelaksana untuk menjalankan pemerintahan secara amanah.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan disajikan meliputi jenis kelamin, , umur, pendidikan terakhir dan asal kedudukan dalam kelembagaan Sekolah. Dari hasil pengelompokan data yang masuk maka komposisi jenis kelamin bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebesar 90,48 persen sedangkan responden perempuan sebesar 9,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan pada umumnya adalah laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa sebahagian besar responden yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan adalah mereka yang berpendidikan SLTA (64,29 persen), dan

mereka yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 14,29 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP sebesar 21,43 persen.

Berdasarkan kedudukannya diketahui bahwa sebahagian besar responden yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan adalah Komite Sekolah (35,71 persen), Pihak Sekolah sebesar 28,57 persen, para guru sebesar 14,29 persen dan aparat dari Dinas pendidikan sebesar 4,14 persen. Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan publik yang melibatkan semua komponen sekolah dan komite sekolah.

Variabel Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penelitian ini difokuskan pada variabel akuntabilitas pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan, dengan indikator: Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pemahaman responden tentang Adanya proses pembuatan keputusan yang

dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan menyatakan bahwa yang menyatakan terpenuhi baru mencapai 38,10 persen dan sangat terpenuhi 14,29 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak terpenuhi sebesar 28,57 persen dan 19,05 persen lainnya menyatakan tidak terpenuhi.

Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan belum sepenuhnya dapat memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-prinsip administrasi yang benar. Sebagaimana dijelaskan Dana BOS digunakan untuk:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya

asrama/pondokan dan membeli informasi merupakan hal yang sangat penting.

- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.
- n. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.
- o. Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan dana BOS

Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab Sekolah dalam pengelolaan dan BOS adalah:

- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

Dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2002) disebutkan bahwa: Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Untuk melaksanakan prinsip tersebut maka kelengkapan

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program dalam pengelolaan dana BOS , sebesar 50 persen responden menyatakan lengkap dan 28,57 persen menyatakan sangat lengkap. Namun demikian masih ditemukan adanya jawaban respondehn yang menyatakan kurang lengkap (14,29 persen) dan bahkan 7,14 persen menyatakan tidak lengkap dalam kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Hal ini berart bahwa masih diperlukan adanya kelengkapan informasi secara akurat dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Sedangkan penganggaran sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004: 61). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik termasuk desa. Dalam organisasi publik anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Atas dasar itulah maka pembicaraan tentang persoalan penganggaran akan terkait dengan keuangan negara dan juga akuntabilitas.

Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan dalam pengelolaan dana BOS adalah sangat penting. Kejelasan dari sasaran kebijakan mengandung makna bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang didanai dari dana BOS harus ada kejelasannya. Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa sebesar 40 persen responden menyatakan sudah adanya kejelasan dari sasaran kebijakan

yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan dan 38,10 persen menyatakan sangat jelas. Namun demikian masih ditemukan adanya responden yang menyatakan kurang jelas (16,67 persen) dan yang menyatakan adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dapat dikomunikasikan tidak jelas sebesar 4,76 persen.

Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pengelolaan dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai oleh BOS dibahas pada Bab berikutnya. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk

investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah. Sekolah Penerima BOS adalah :

- a. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
- b. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas
- b. Bagi Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis para periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik.
- c. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas

Bagi sekolah yang masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS, sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan

pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (Bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.

Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas dalam pengelolaan dana BOS sebahagian besar responden menyatakan layak dan konsisten (47,62) dan sangat layak dan konsisten 38,10 persen, sedangkan yang menyatakan kurang layak sebesar 9,52 persen dan 4,76 persen lainnya menyatakan tidak layak. Hal ini berarti dalam pengelolaan alokasi anggaran desa di desa-desa wilayah SD Negeri No. 060958 Belawan menunjukkan adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Adanya Penyebarluasan Informasi Mengenai Pengelolaan Dana BOS

Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, di samping tetap menjaga kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS yang menyatakan disebarluaskan sebesar 38,10 persen dan 28,57 persen sangat disebarluaskan, sedangkan yang menyatakan kurang disebarluaskan sebesar 23,81 persen dan 9,52 persen lainnya menyatakan tidak disebarluaskan.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan bahwa Mekanisme Penyaluran Dana, syarat penyaluran dana BOS adalah:

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi)

- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota (Format BOS -03)
- c. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS BBM Propinsi (Format BOS -04A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS -04B)
- d. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut (gambar 3).
- e. Satker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- f. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
- g. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.
- h. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekenis Kas Negara.

Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyaluran (Pos/Bank). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode Juli-Desember 2008 dapat digunakan kembali/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu.

Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Menurut Budiarto (2006), akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan ada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor

Adanya Akses Publik Pada Informasi atas Pengelolaan Dana BOS

Kebebasan atas informasi yang kini telah diatur dalam perundang-undangan dengan lebih jelas dan terperinci, merupakan suatu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945, yang berbunyi: "...setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...". Amandemen tersebut merupakan penguatan dan pengulangan atas ketentuan yang persis sama yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahun 1999 melalui pasal 14 UU No.39 Tahun 1999. Tujuan utama adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kebebasan informasi adalah:

- a. mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi,
- b. meningkatkan akses publik pada data dan informasi,
- c. memastikan agar lembaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa,

- d. memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga.
- e. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya akses publik pada informasi atas pengelolaan Dana BOS menyatakan bahwa responden yang menyatakan tersedianya akses publik terhadap pengelolaan dana BOS sebesar 38,10 persen dan 19,05 persen menyatakan sangat tersedia akses publik, sedangkan yang menyatakan kurangnya ketersediaan akses publik dalam pengelolaan dana BOS sebesar 28,57 persen dan 14,29 persen lainnya menyatakan tidak tersedianya akses publik terhadap pengelolaan dana BOS.

Adanya Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil

Pada era informasi ini kegiatan pelaksanaan program suatu organisasi tidak terlepas dari peran Teknologi Informasi (TI). TI merupakan sarana andalan guna meningkatkan peran monitoring, membantu organisasi dalam mewujudkan efisiensi proses *back office*, meningkatkan kualitas mulai kegiatan administrasi, proses-proses external dan internal, membantu mengambil keputusan, merencanakan ke depan bagi keberlangsungan kegiatan dan apa yang menjadi sasaran kegiatan, karena terpantaunya kegiatan melalui sistem

informasi. Upaya untuk mendukung pemantapan administrasi program dapat didukung dengan pembangunan sistem informasi manajemen monitoring pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi peningkatan administrasi project yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengembangan, publikasi hingga report secara tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS ditemukan bahwa responden yang menyatakan adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS sebesar 38,10 persen dan 7,14 persen menyatakan sangat tersedia akses publik, sedangkan yang menyatakan kurangnya ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS sebesar 21,43 persen dan 33,33 persen lainnya menyatakan tidak tersedianya adanya sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi anggaran desa di SD Negeri No. 060958 Belawan belum seluruhnya ada sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan Dana BOS. Hal ini disebabkan karena

keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di desa terutama yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan

Adanya Laporan Pertanggungjawaban (Annual Report)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dijelaskan bahwa Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu: 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; 2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; 3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; 4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) atas pengelolaan Dana BOS ditemukan bahwa responden yang menyatakan adanya adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) sebesar 54,76 persen dan 23,81 persen menyatakan selalu adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*), sedangkan yang menyatakan kuranya ketersediaan adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) atas pengelolaan Dana BOS sebesar 9,52 persen dan 4,76 persen lainnya menyatakan tidak tersedianya adanya laporan pertanggungjawaban (*Annual Report*) atas pengelolaan Dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi anggaran desa di SD

Negeri No. 060958 Belawan belum seluruhnya ada sistem informasi manajemen dan monitoring hasil atas pengelolaan dana BOS.

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah: 1. Penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan Formulir BOS -K7 seperti yang terdapat pada Lampiran II. 2. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran. 3. Lembar pencatatan pengaduan. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Temuan penelitian menunjukkan ada kesenjangan informasi di internal tim manajemen BOS. Kepala Sekolah adalah aktor paling mengetahui persoalan BOS. Sebaliknya komite sekolah adalah anggota tim yang kekurangan informasi. Keterlibatan komite sekolah dalam tim belum sampai taraf menjadi *stakeholder* yang menentukan pengelolaan dan BOS. Temuan dari beberapa responden, keberadaan komite baru sebagai pemenuhan syarat pencairan BOS.

Kesenjangan informasi juga terjadi antara tim manajemen BOS dan para pemangku kepentingan sekolah terkait, yaitu orang tua siswa, guru, dan siswa sendiri. Guru, yang merupakan aktor

paling penting dalam proses pembelajaran di sekolah, ternyata tidak semuanya mengetahui penggunaan BOS. Tak pelak lagi, terkadang orang tua hanya mendapatkan informasi soal kekurangan dana sekolah. Saat itulah keterlibatan orang tua siswa sangat diharapkan sekolah.

Pemangku kepentingan yang jarang dipertimbangkan dalam manajemen keuangan BOS adalah siswa. Mereka adalah pihak paling penting yang menjadi sasaran program sekolah. Merekalah konsumen langsung pelayanan sekolah. Namun pada kenyataannya, tidak banyak yang bisa dilakukan murid untuk ikut menentukan penggunaan dana dan pengawasannya.

Dalam hal perencanaan, pelibatan siswa sangat mungkin dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sekolah. Dalam hal pengawasan, siswa adalah aktor paling potensial. Selama ini siswa dianggap anak-anak yang tidak perlu tahu urusan keuangan sekolah. Ini paradigma yang perlu diubah. Siswa bisa dilibatkan dari hulu sampai hilir proses anggaran sekolah.

Menurut panduan dari pemerintah pusat, sekolah harus memberitahukan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah. Itu adalah bentuk transparansi sekolah kepada masyarakat. Hal mudah itupun tak semua sekolah bisa

melaksanakannya. BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dari pemerintah provinsi. Cara ini diharapkan bisa menurunkan tingkat korupsi. Setidaknya itu menurut evaluasi Bank Dunia. Fakta di lapangan menunjukkan ada persoalan pada akuntabilitas sekolah. Peluang korupsi kini justru ada di sekolah. Meskipun alokasi BOS sudah ditentukan *rigid* dari pusat, pihak sekolah selalu bisa mereka-reka peruntukannya, baik untuk tujuan positif, maupun negatif.

Laporan keuangan BOS juga harus diketik dengan komputer dengan format tertentu. Tak semua bendahara bisa mengoperasikan komputer dan akhirnya meminta bantuan dari tempat penyewaan komputer untuk mengetikkannya. Itu membutuhkan biaya rutin tersendiri. Belum lagi belanja kertas yang membengkak dari tahun sebelumnya yang hanya membutuhkan buku kas kwarto untuk catatan debit/kredit.

Pencatatan yang paling sulit adalah pajak. Setiap belanja dikenakan pajak. Sekolah belum terbiasa dengan pencatatan ini. Sekolah-sekolah di pelosok desa mesti datang ke kota untuk menyetorkan pajak. Beberapa sekolah mengaku mengeluarkan biaya perjalanan lebih besar daripada pajak yang akan dibayarkan. Ini tentu saja tidak efisien

Peran Masyarakat Dalam Membantu Akuntabilitas Anggaran Pendidikan

Seringkali masyarakat terkecoh dengan pengertian manajemen berbasis sekolah sehingga terdapat pengertian seolah-olah sekolah dan manajemen sekolah terbebas dari regulasi dan bisa bertindak dengan mengabaikan factor-faktor eksternal lainnya. Hal-hal yang harus dipahami adalah :

1. Manajemen sekolah (sekolah Negeri) terdiri dari PNS yang terikat dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekolah adalah institusi yang ada karena peraturan perundang-undangan dan memiliki kegiatan karena peraturan perundang-undangan.
3. Lingkungan sekolah membawa beban nilai-nilai kemuliaan yang harus diisi oleh jajaran guru, karyawan dan siswa.

Agar aspek akuntabilitas keuangan di sekolah berjalan dengan baik, masyarakat (khususnya orangtua murid) dapat berperan :

1. Senantiasa bisa mengetahui pertanggung jawaban keuangan tambahan biaya /dana komite tahun sebelumnya.
2. Senantiasa mengingatkan jika terdapat tambahan di luar yang telah disepakati.

3. Mengevaluasi program yang telah dilaksanakan untuk dinilai apakah layak diteruskan atau dirubah (khususnya kegiatan yang ditujukan untuk siswa).
4. Menanyakan bukti dari peningkatan yang bisa ditunjukkan baik dari kualitas akademis maupun kualitas output, mengingat pemerintah telah mencukupi kebutuhan yang menjadi beban sekolah.
5. Meminta adanya progress report utamanya untuk kegiatan yang secara langsung terkait dengan kepentingan siswa (kegiatan pengayaan, tambahan jam mengajar dsb.)
6. Adanya jaminan bahwa tambahan biaya (utamanya yang terkait dengan kepentingan akademis siswa) memang dilaksanakan oleh guru yang professional, bermutu dan terbukti telah mengantarkan output siswa sebelumnya. Bukan kegiatan yang hanya untuk pemerataan kesejahteraan guru.
7. Senantiasa menanyakan bahwa kegiatan yang dibiayai dari dana tambahan/komite tidak dibiayai oleh anggaran pemerintah.
8. Menegaskan bahwa program dan kegiatan dari dana tambahan/komite memang terkait dengan kepentingan siswa bukan program dan kegiatan

yang diada-adakan oleh sekolah agar mempunyai dalih untuk member tambahan penghasilan pada guru dan karyawan.

9. Mengefektifkan peran komite agar benar-benar bisa mewakili aspirasi orang tua dan masyarakat.
10. Penyusunan RAPBS yang didalamnya termasuk biaya tambahan dari dana komite harus terkait dengan pertanggung jawaban RAPBS tahun sebelumnya yang dikaji dengan hasil evaluasi.

SIMPULAN

Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan dilihat dari aspek Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan pengelolaan dana BOS , Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan, dan Adanya kelayakan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan secara umum telah berjalan dengan baik. Aspek akuntabilitas dalam Pengelolaan BOS di SD Negeri No. 060958 Belawan yang belum efektif dalam pelaksanaannya adalah penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dana BOS , akses publik pada informasi atas kegiatan pengelolaan dana BOS , sistem informasi manajemen dan monitoring hasil dan

Laporan pertanggung jawaban (*annual report*). Untuk pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di di SD Negeri No. 060958 Belawan sudah memenuhi standar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) karena dalam pengelolaannya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam penyalurannya sudah tepat sasaran; Opini atas hasil akuntabilitas dapat disimpulkan, dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna di SD Negeri No. 060958 Belawan sudah memenuhi standar akuntansi auditor karena dalam pengelolaan dana BOS dapat dikatakan hasil auditnya sudah mencakup Wajar Tanpa Pengecualian, dan dalam standar auditing juga sudah mencakup tentang standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan; Kendala-kendala dalam proses pengelolaan dana BOS berdasarkan persepsi pengguna dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala kepala sekolah dan bendahara tentang informasi Tim Manajemen Kota Medan belum dipahami oleh sekolah, masih terdapat masalah dalam pengalokasian, dengan adanya kendala ini kepala sekolah dan bendahara harus lebih memahami tentang informasi Tim Manajemen guna untuk kelancaran pengelolaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, A. (2006). Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Allen, R. & Tommasi, D. (2001). Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. Paris: SIGMA-OECD
- Dwiyanto, A, et all, (2012), Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Kumorotomo, W & Purwanto, E.A. (eds.), (2013). Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya, MAP Press, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2013
- Kumorotomo, W. (2008). Teknik Penganggaran Untuk Perencanaan Sosial, Materi ini disampaikan pada Pelatihan Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Provinsi Maluku Utara. Ternate, 14-21 Januari 2008.
- Loina, L.K.P. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Jakarta, Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mardiasmo, (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Moleong, L.J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT.Remaja Rosdhakarya.
- Pranoto, (2009). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bahan Diklat SPAMA, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,.
- Sutopo, H. (2008). Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis), Surakarta, Pusat Penelitian UNS.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.